MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
NO. V/MPRS/1965 *)

TENTANG

AMANAT POLITIK PRESIDEN/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/ MANDATARIS MPRS YANG BERJUDUL "BERDIKARI" SEBAGAI PENEGASAN REVOLUSI INDONESIA DALAM BIDANG POLITIK, PEDOMAN PELAKSANAAN MANIPOL DAN LANDASAN PROGRAM PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA

M U K A D I M A H :

Bahwasanya berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Rakyat Indonesia sekarang sedang berada dalam situasi revolusioner melaksanakan ofensif revolusioner manipolis melawan musuh-musuh revolusi dari luar dan dalam negeri, terutama penggayangan terhadap proyek nekolim "Malaysia" yang dipaksakan oleh imperialisme Inggeris, yang dibantu oleh imperialisme Amerika Serikat yang juga merupakan mata-rantai "Life-line of imperialism" yang membentang dari selat Jibraltar melalui selat Sumatera sampai lautan Jepang serta sisa-sisa kolonialisme/feodalisme.

Sejalan dengan meningkatnya Revolusi Indonesia, perlu dikikis-habis pengaruh buruk/sisa-sisa kebudayaan imperialis/feodalis dalam segala bentuk dan manifestasinya, dalam hubungannya dengan pembangunan kebudayaan nasional yang seluas-luasnya.

Revolusi Indonesia mengikuti garis-pertumbuhannya yang selalu meningkat terus-menerus, semakin tinggi menuju perwujudan tujuannya yang sungguh besar. Dan pada masa ini Revolusi Indonesia sudah hamapir selesai dengan tahapnya yang pertama ialah tahap Nasional-Demokratis yang dengan demikian harus diselesaikan setepat-tepatnya dan mulai memasuki tahapnya yang kedua ialah tahap Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

Senafas dengan meningkatnya Revolusi Indonesia dalam menuju terciptanya Dunia Baru mengharuskan perombakan/banting stir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan atas dasar tuntutan-tuntutan prinsip Dekon dan prinsip "Berdiri Diatas Kaki Sendiri" (BERDIKARI) sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

Dengan perkembangan Revolusi Indonesia yang terus meningkat maju sekarang ini menunjukkan lebih terkristalisasinya Pancasila sebagai falsafah negara dan juga semakin kokohnya dasar persatuan dan kesatuan Nasakom yang dalam jiwa dan watak persatuan - dan - kesatuan nasional progresif-revolusioner-nya adalah perasan daripada Pancasila.

Konfrontasi yang terus-menerus terhadap nekolim dalam rangka menciptakan Dunia Baru mengharuskan peningkatan pembangunan Angkatan Bersenjata dalam hubungannya dengan penyempurnaan pertahanan/keamanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan abad ke-XX.
Peranan Indonesia dalam perjuangan membangun Dunia Baru selalu menunjukkan sifat-sifat kepeloporan sesuai dengan sifatnya anti nekolim.

Garis perjuangan Revolusi Indonesia yang telah dirintis dan digalang dalam KAA 1, melalui GANEFO, MMAA, KPAA, KWAA, KIAA, hijrahnya. Indonesia dari P.B.B dan lain-lain itu menunjukkan tugas dan tanggung jawab Revolusi kita sebagai mercusuar bagi perjuangan Rakyat-rakyat Afrika-Asia dan Amerika Latin untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat diseluruh muka bumi.

Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS pada tanggal 11 April 1965 yang berjudul "BERDIKARI" didepan Sidang Umum MPRS ke-III mencakup bidang politik yang makin meningkat dan pembantingan stir dalam jiwa dan alam pikiran serta kebijaksanaan pembangunan.

Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam musyawarahnya pada tanggal 11 s/d 16 April 1965 di Bandung dengan secara bulat dan khidmat :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pasal 1

Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS pada tanggal 11 April 1965 yang berjudul "BERDIKARI" di depan SIdang Umum MPRS ke-III sebagai :

a. Penegasan dalam bidang politik mengenai Revolusi Indonesia pada tingkatnya sekarang, dan peranan Indonesia dalam perjuangan membangun Dunia Baru;
b. Pedoman pelaksanaan haluan Negara Manipol;
c. Landasan program perjuangan Rakyat Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan/keamanan.

Menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS untuk melaksanakan Ketetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 April 1965

---

*)DICABUT dengan Ketetapan MPRS No.: XXXVIII/MPRS/1968